

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN:
PENDEKATAN TINDAKAN KOLEKTIF (COLLECTIVE ACTION) PADA
PETANI DI DESA TRETES KECAMATAN PUJON KABUPATEN
MALANG**

Henny Oktavianti

(Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo)

Munawar Ismail dan Ahmad Erani Yustika

(Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya)

Abstract

Poverty have multidimensional character. Poverty not only concern with economic, but also non-economic (social, culture and politics). One of the communities which in poverty trap is peasant. This thesis describes why peasants get poverty and what the effort of peasant to move out from poverty. Researcher observe peasant life pattern from social capital side which owned by peasant in Tretes Village. Result of this research show that social capital of peasant in Tretes Village can motivate collective action. The kinds of collective action poured into arrangement that have been done by peasant to move out from poverty trap but there are many constrains inside. Therefore, it is made compulsory indirectly governmental interference to support peasant arrangement become an action that able to move out peasant from poverty trap in Tretes Village.

Keywords: poverty, collective action, social capital, rural, peasant.

PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di Indonesia. Angka kemiskinan menurut daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Menurut data BPS sampai pada tahun 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang lebih memprioritaskan pada upaya mensejahterakan penduduk di wilayah pedesaan.

Wilayah pedesaan di Indonesia seba-

gian penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, sehingga kemiskinan banyak menimpa petani. Ciri-ciri masyarakat desa (petani) yang sangat menonjol adalah adanya pola interaksi antar individu seperti: gotong royong, resiprositas (*reciprocity*), kepercayaan (*trust*), norma sosial, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat modal sosial yang eksis dalam jaringan masyarakat pedesaan, khususnya petani. Demikian pula dengan daerah penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Desa Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten

Di Desa tersebut matapecaharian penduduk adalah petani miskin, di mana modal sosial juga eksis. Homogenitas matapecaharian dan pendapatan yang tidak menentu mendorong petani miskin di Desa Tretes untuk memutuskan suatu tindakan bersama yang dapat mendorong perekonomian mereka dan dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Tindakan bersama ini sering disebut sebagai tindakan kolektif (*collective action*). Tindakan kolektif (*collective action*) timbul karena adanya kekuatan modal sosial pada Desa Tretes.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bentuk tindakan kolektif (*collective action*) yang muncul dari adanya kesepakatan (*arrangement*) petani didukung dengan adanya modal sosial sebagai upaya petani untuk keluar dari perangkap kemiskinan (*poverty trap*). Selain itu, peneliti tertarik untuk memilih daerah penelitian di Desa Tretes karena fenomena kemiskinan di daerah pedesaan dapat dilihat di Desa Tretes Kecamatan Pujon. Penduduk Desa Tretes yang bermatapecaharian sebagai petani, rata-rata adalah petani miskin. Dalam komunitas petani tersebut, memiliki organisasi yang beranggotakan para petani atau yang sering disebut dengan kelompok usaha tani (KUT). Kondisi KUT di Desa Tretes memiliki keunikan tersendiri. Di Desa tersebut terdapat 2 (dua) KUT yang bekerjasama dengan pabrik pertanian yang berbeda. Pabrik tersebut menyuplai berbagai macam kebutuhan tani, mulai dari benih sampai pestisida.

Uniknya masing-masing kelompok yang telah memiliki anggota sendiri-sendiri lebih cenderung memilih salah satu KUT yang mereka anggap lebih peduli dan lebih lunak sistem pembayaran serta kerjasamanya, di mana mereka mengandalkan kepercayaan (*trust*) sebagai jami-

nannya. Para petani lebih melihat kearifan dan kejujuran seorang ketua kelompok, tapi mereka juga tidak terlalu memperdulikan kesalahan seseorang.

Setelah melakukan pengamatan dan diskusi singkat, menurut peneliti, Desa Tretes sangat cocok untuk dijadikan obyek penelitian yang terkait tindakan kolektif dengan modal sosial sebagai pendukung teori tersebut dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Desa tersebut. Selain itu, Petani yang hidup di wilayah pedesaan rentan akan kondisi kemiskinan. Petani Desa Tretes rata-rata adalah petani miskin berpendapatan rendah. Keutamaan petani Desa Tretes adalah adanya modal sosial yang baik dan dapat dijadikan sebagai modal dasar penanggulangan kemiskinan melalui tindakan kolektif (*collective action*).

Dari uraian di atas, peneliti akan lebih memfokuskan penelitian ini dengan tujuan: (1) mengetahui bagaimana struktur dan karakteristik kemiskinan di Desa Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; (2) memahami bagaimana modal sosial (*social capital*) yang ada di Desa Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; (3) menganalisa bagaimana bentuk dan pengaruh tindakan kolektif (*collective action*) dalam lingkaran kemiskinan di Desa Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; serta (4) merumuskan kebijakan-kebijakan apa saja yang kiranya paling diperlukan dalam rangka mengurangi cakupan dan tingkat kemiskinan.

Konsepsi Kemiskinan

Pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak.

Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena: (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif (Sahdan, 2007).

Klasifikasi Kemiskinan

Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam (Muttaqin, 2007).

Secara teoritik Mas'ood (1994) melihat kemiskinan dipahami melalui akar penyebabnya yang dibedakan menjadi dua kategori: pertama, kemiskinan alamiah, yaitu suatu kemiskinan yang timbul akibat terbatasnya sumber atau tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Artinya

secara alamiah kemiskinan memang ada bukan adanya kelompok atau individu yang ada dalam masyarakat yang lebih miskin dari yang lain. Kedua, kemiskinan buatan (*artificial*), yaitu struktur sosial yang ada membuat masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Dalam arah selanjutnya, kemiskinan buatan inilah yang sering mengisi wacana para pakar sosial sebagai kemiskinan struktural.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yakni nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara 2.100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Sementara menurut Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1981, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Multidimensi Strategi dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pertama, yang paling jelas bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dll. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.

Kedua, Kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Menurut Susanto (1977) berpendapat bahwa adanya proses sosial mengindikasikan adanya suatu gejala perubahan, gejala penyesuaian diri, gejala pembentukan, serta gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat dengan individu atau sebaliknya. Semua gejala tersebut disebabkan karena individu-individu di dalam kelompok menyesuaikan diri satu sama lain serta menyesuaikan diri dengan keadaan. Usaha ini akan terus menerus dilakukannya selama kelompok tersebut bernilai baginya dan selama dirasakannya bahwa dirinya memerlukan kelompok untuk kemajuan dan perkembangan dirinya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Untuk itu serangan terhadap kemiskinan sama artinya pula dengan pengikisan budaya ini. Apabila budaya ini tidak dihilangkan maka kemiskinan ekonomik juga sulit ditanggulangi.

Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan bahwa orang yang miskin secara struktural atau politik akan berakibat pula miskin alam material (ekonomi). Untuk itu langkah pengentasan kemiskinan apa-

bila ingin efektif juga harus mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

Menurut Ritzer (1980), kemiskinan mempunyai berbagai macam fungsi yang berdimensi ekonomi, sosial, kultural dan politik. Kemiskinan akan tetap berlangsung di dunia selama kemiskinan masih tetap fungsional terhadap berbagai unit dalam masyarakat dan belum adanya alternatif lain dalam berbagai pelaksanaan fungsi bagi orang miskin. Menurutnya, kemiskinan akan lenyap melalui 2 (dua) syarat, yaitu: *pertama*, bila kemiskinan itu sudah sedemikian tidak berfungsi lagi bagi kemakmuran. *Kedua*, bila orang miskin berusaha sekuat tenaga untuk mengubah sistem yang dominan dalam stratifikasi sosial.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Friedmann (1992) kemiskinan disebabkan karena tidak adanya pemberdayaan, dan perlunya solusi tentang 8 (delapan) dasar kekuatan sosial sebagai sarana dasar yang tersedia dalam ekonomi keluarga untuk keberlangsungan hidupnya, yaitu:

- a. *Pertahanan ruang hidup (defensible life space)*. Sebagai dasar wilayah ekonomi keluarga, pertahanan hidup mencakup ruang fisik, di mana anggota keluarga memasak, makan, tidur dan jaminan perlindungan terhadap barang milik pribadi. Dalam pengertian lebih luas.
- b. *Waktu luang (Surplus Time)*. Waktu yang terdapat pada keluarga ekonomi mampu dan merupakan waktu di atas waktu yang diperluakan untuk menambah nafkah pekerjaan.
- c. *Pengetahuan dan ketrampilan (knowledge and skill)*. Tingkat pendidikan dan penguasaan ketrampilan khusus dalam ekonomi sangat menguntungkan untuk mempertinggi prospek jangka

panjang ekonomi keluarga.

- d. Informasi yang tepat (*appropriate information*). Informasi yang akurat dan rasional berhubungan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- e. Organisasi sosial (*social organization*). Termasuk organisasi formal dan informal yang berasal dari keluarga.
- f. Jaringan Sosial (*social networks*). Keluarga merupakan jaringan horisontal yang luas (keluarga, teman, tetangga) jaringan kerja vertikal ini melewati tingkat sosial untuk memperbaiki adanya perubahan keluarga dengan kekuatan tetapi ada ketergantungan hubungan patron client.
- g. Sarana dalam pekerjaan dan lingkungan keluarga (*instrumen of work and livelihood*). Sebagai alat produksi keluarga, semangat yang kuat untuk produksi pedesaan.
- h. Sumber keuangan (*financial resources*). Jaringan pendapatan keluarga baik secara formal dan informal melalui kredit.

Menurut Mas'ood (1994), penyebab kemiskinan struktural menyangkut beberapa hal, yaitu: (i) *policy bias*, di mana kebijakan pemerintah cenderung mengutamakan kota, mengistimewakan komoditi ekspor serta kebijakan pangan yang mengistimewakan bahan makanan impor; (ii) *proses-proses kelembagaan*, seperti kelangkaan akses tanah dan pengairan, penetapan bagi hasil dan sewa menyewa tanah yang timpang, pasar yang kurang berkembang dan kelangkaan kredit serta kurangnya fasilitas pelatihan; (iii) *dualisme ekonomi*, pengambilan sumber daya yang besar untuk mengembangkan pertanian komersial dan berorientasi ekspor, sementara petani kecil dan pinggiran tidak punya kesempatan berkembang; (iv) *kekangan kependudukan*; (v) *manajemen*

sumberdaya alam dan lingkungan, yang sangat berkaitan dengan kelangkaan sumberdaya alam; (vi) *siklus dan proses alamiah*, berupa kelangkaan pangan yang bersifat musiman sehingga kaum miskin di pedesaan segera menjual hasil pertaniannya meski dengan harga yang murah demi memenuhi kebutuhan jangka pendek dan membeli bahan-bahan pertanian kembali dengan harga yang lebih tinggi; (vii) *marginalisasi wanita*, adanya diskriminasi wanita sehingga mereka sulit mendapatkan akses input; (viii) *tengkulak yang eksploitatif*, seperti pemilik terhadap penggarap, pelepas uang terhadap peminjam, pedagang terhadap petani kecil, dll; (ix) *fragmentasi politik internal dan gejala sosial*, misal kemiskinan di Timor Timur yang berkepanjangan akibat dari kericuhan daerah; serta (x) *proses internasional*, di mana kemiskinan terjadi di negara yang penghasilannya tergantung pada pasar internasional.

Tinjauan Kemiskinan dari Aspek Non Ekonomi

Lewis (1966) merupakan tokoh utama yang melihat fenomena kemiskinan dengan pendekatan budaya. Dengan konsep *cultural poverty* Lewis berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (*economic deprivation*) yang berlangsung lama. Lewis menemukan bahwa kemiskinan adalah salah satu sub-kultur masyarakat yang mempunyai kesamaan ciri antar etnik satu dengan etnik yang lain. Akar dari timbulnya budaya miskin tersebut, menurut pendapat Lewis (1966; dalam Sukmana, 2005) adalah keadaan masyarakat yang mempunyai ciri-ciri:

1. Sistem perekonomian yang terlalu berorientasi pada mencari keuntungan.
2. Tingginya angka pengangguran dan angka *under employment* bagi golo-

ngan yang tidak punya keahlian (*unskilled labor*).

3. Rendahnya upah atau gaji yang diperoleh para pekerja.
4. Tidak adanya organisasi sosial, politik, dan ekonomi bagi kaum miskin, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat (NGO).
5. Adanya sistem kekeluargaan yang bilateral yang menggantikan sistem unilateral.
6. Hadirnya kelas masyarakat yang dominan, menekankan pada penumpukan harta dan kekayaan, kesempatan untuk terus meningkat dalam status (*upward mobility*). Anggota kelas masyarakat ini beranggapan bahwa kemiskinan disebabkan oleh karena sifat pribadi yang lemah dan inferior.

Oleh karena itu, kemiskinan yang sangat berhubungan dengan perekonomian individu atau kelompok memerlukan perhatian dan penanganan dari berbagai dimensi termasuk dimensi sosial, menurut Lampert (1994) setiap tatanan ekonomi perlu menyertakan muatan sosial tertentu karena lingkungan ekonomi mempunyai efek berkesinambungan terhadap kedudukan sosial individu atau kelompok. Jadi, kedudukan sosial, status sosial, serta keamanan sosial individu dan kelompok tergantung pada distribusi pendapatan dan kekayaan; pada kesetaraan peluang; pada ketersediaan pilihan untuk perkembangan individu, dan sebagainya. Muatan sosial yang ada dalam suatu tatanan ekonomi mungkin perlu diukur melalui standar gagasan-gagasan masyarakat mengenai norma dan tujuan sosial.

Model Tindakan Kolektif (Collective Action Model)

Ahli-ahli kelembagaan mengutamakan pandangan tentang eksistensi adanya tindakan kolektif (*collective action*) dari

individu-individu di dalam masyarakat. Menurut Samuels (1995; dalam Yustika, 2006) menyimpulkan ada 8 (delapan) aspek dari ekonomi kelembagaan, di mana salah satu aspek tersebut berkaitan dengan kultur dan kekuasaan (*culture and power*). Aspek ini menentukan cara bagaimana individu berperilaku. Individu-individu diikat oleh masyarakat melalui norma-norma dan nilai-nilai sehingga mereka cenderung bertindak secara kolektif daripada pribadi-pribadi.

Menurut Coleman (1994), fenomena sistem yang dikelompokkan secara longgar biasa disebut dengan perilaku kolektif yang pada umumnya mempunyai beberapa elemen, antara lain:

- Fenomena tersebut melibatkan sejumlah orang yang melakukan tindakan yang sama atau mirip pada waktu yang bersama.
- Perilaku yang ditampilkan tersebut bersifat sementara atau terus menerus berubah, tidak dalam kondisi seimbang/stabil.
- Terdapat semacam ketergantungan tertentu di antara tindakan-tindakan tersebut; individu tidak bertindak secara bebas.

Oleh karena karakteristik perilaku sosial yang demikian, maka perilaku kolektif sangat bermanfaat untuk mengkaji perubahan sosial.

Pada saat ini para ekonom banyak membahas ide tentang "ekonomi kelembagaan baru" (*new institutional economics/NIE*). Menurut Yustika (2006) NIE menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan nonpasar (*non-market institutions*) dengan fondasi teori ekonomi neoklasik. NIE mengeksplorasi gagasan kelembagaan nonpasar (hak kepemilikan, kontrak, partai revolusioner, dan lain-lain) sebagai jalan untuk mengkompensasi kegagalan pasar (*market failure*). Dalam

pendekatan NIE, kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternalitas produksi (*production externalities*), dan barang-barang publik (*public goods*) diidentifikasi sebagai sumber terpenting (*key sources*) terjadinya kegagalan pasar sehingga meniscayakan perlunya kehadiran kelembagaan nonpasar. Tindakan kolektif (*collective action*) diasosiasikan dengan tulisan Mancur Olson, Eleanor dan Vincent Ostrom, serta yang lainnya; yang mencoba mengeksplorasi keadaan ketika pelaku ekonomi akan memperoleh keberhasilan bila melakukan kerjasama, baik dalam domain ekonomi maupun politik. Hal ini sekaligus dapat memberikan bukti, sebagai contoh, bahwa usaha tani yang dikontrol oleh petani lebih mungkin berhasil dalam menyediakan jasa pemasaran bagi para anggotanya.

Dalam tulisan Olson (1965) tentang logika tindakan kolektif (*collective action*), Olson mengkritik pendekatan yang dipakai oleh aliran pluralisme dan Marxisme yang mengabaikan masalah tindakan kolektif untuk kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam masyarakat. Menurutnya, tidak rasional bagi individu-individu untuk ikut memberikan kontribusi bagi kepentingan-kepentingan kolektif. Lanjutnya, adalah keliru jika kelompok-kelompok akan bertindak seperti kepentingan mereka sesuai logika yang mengikuti premis perilaku rasional dan kepentingan diri sendiri karena berbagai kepentingan publik tidak bisa diorganisasikan. Begitu juga berbagai kelompok selamanya tetap dan berbagai kelas selamanya "classes in themselves". Evaluasi plural juga dibahas dalam teori pilihan sosial yang menentang pluralitas sebagai sesuatu yang sudah ada dengan sendirinya (Sen, 1988).

Menurut Di Gregorio et. al. (2004; dalam Syamsuddin et. al., 2007) pada dasarnya satu individu masyarakat secara

alami akan cenderung memilih melakukan aksi bersama dengan individu lain ketika mereka merasa ada kesamaan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan ketika mereka merasa adanya ketidakpastian dan resiko yang dihadapi jika bergerak sendiri. Berbagai studi menunjukkan peran tindakan kolektif (*collective action*) dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pihak institusi yang lebih tinggi ketika mereka menuntut pelayanan publik atau meminta perlindungan. Meinzen-Dick dan Knox (1999; dalam Syamsuddin, 2007) menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan desentralisasi dengan sebagian kewenangan pusat beralih pada daerah, seperti halnya dalam perencanaan pembangunan menurut UU 25/2004, aksi kolektif dibutuhkan dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan individu, menyusun aturan kelompok dan memobilisasi sumberdaya berupa uang, tenaga dan materi lainnya.

Menurut Miller (1992) tindakan kolektif (*collective action*) dapat timbul dilingkungan sosial mana saja, dimana terdapat komunitas atau kelompok serta adanya kepentingan individu yang sejalan dengan tujuan bersama dalam kelompok tersebut. Seperti dalam tulisan Ostrom (2000) tentang adanya ancaman penunggang bebas (*free rider*) yang memfaatkan secara bersama (*collective benefits*) terhadap pengadaan barang publik. Sehingga ada menimbulkan biaya tambahan untuk pengadaan investasi sumber daya berkaitan dengan monitoring serta menghukum setiap tindakan dari *free rider*. Studi lain, berkaitan dengan penanggulangan *free-rider* dikemukakan oleh Gächter dan Fehr (1999). Mereka berpendapat bahwa adanya peran persetujuan sosial dalam aksi kolektif dan menentukan persetujuan sosial manakah yang mampu menanggulangi munculnya *free-rider*.

Dari berbagai pernyataan dan pendapat para pemikir tersebut mengindikasikan bahwa tindakan kolektif (*collective action*) mendorong masyarakat memainkan peran sosial dan politiknya, misalnya melalui partisipasi mereka dalam proses kebijakan. Menurut Dasgupta (2000), aksi kolektif bagi masyarakat merupakan mekanisme agar "suara" mereka bisa lebih didengar. Dalam konteks pembangunan, aksi kolektif tidak hanya memobilisasi energi setempat dan memperbaiki pelayanan publik, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya *elite capture*.

Dalam studi mengenai tindakan kolektif (*collective action*) yang dilakukan oleh Prasetyamartaty (2006) menunjukkan bahwa dalam temuan empiris di berbagai belahan dunia, baik negara industri maupun negara berkembang, memperlihatkan bahwa karakteristik sumber daya dan karakteristik komunitas mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan baik secara ekologis maupun sosial-ekonomis. Upaya kerjasama sukarela (*voluntary collective choice*) atau tindakan bersama (*collective action*) ditemukan di perikanan pantai, perikanan darat, pengelolaan hutan, padang rumput. Pada tipe pengelolaan ini maka sumber daya dianggap sebagai kepemilikan komunal (*communal rights*).

Terdapat beberapa hal yang mendorong terjadinya tindakan kolektif. Salah satunya adalah karena penghidupan komunitas bergantung pada keberlanjutan sumber daya tersebut, dan sumber daya bersifat langka atau dapat habis, sehingga mereka berusaha menjaganya dan menetapkan aturan dalam pemanfaatannya. Selain itu, aliran manfaat sumber daya laut bersifat bervariasi dan tidak dapat diprediksi, misalnya ikan mudah berpindah, atau stok ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain iklim, oseanografi dan hidro-

logi. Oleh karena itu sulit membatasi kepemilikan dan pemanfaatan suatu sumber daya bagi tiap individu melalui kepemilikan tunggal (*private rights*), sehingga pilihan terbaik pemanfaatan sumber daya semacam ini adalah kepemilikan kolektif.

Faktor interdependensi sosial dan kelangkaan sumber daya membentuk suatu struktur insentif bagi komunitas atau kelompok pengguna untuk melakukan aksi bersama (*collective action*) dalam mengatasi masalah alokasi sumber daya. Tindakan kolektif (*collective action*) pengelolaan sumber daya oleh suatu komunitas akan menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*) dalam pengawasan dan penegakan aturan, karena adanya interdependensi antar anggota komunitas. Pengambilan keputusan seorang individu tidak mungkin hanya mempertimbangkan biaya-manfaat pemanfaatan sumber daya bagi dirinya, namun juga perlu mempertimbangkan ekspektasi individu lain dalam komunitasnya tentang bagaimana seseorang seharusnya memanfaatkan sumber daya. Ini terkait dengan karakter sosial dalam komunitas pedesaan termasuk di pesisir. Karakter sosial mencakup interdependensi, ekspektasi perilaku individu dan norma timbal-balik (*norms of reciprocity*). Dengan keberadaan sanksi sosial atau sanksi adat yang disepakati, maka insentif untuk melakukan pelanggaran aturan atau menjadi penumpang bebas bisa ditekan. Norma timbal-balik tergolong ke dalam modal sosial (*social capital*) yang berpengaruh penting terhadap kerjasama dan keberlanjutan institusi.

Berkaitan dengan norma resiprositas tersebut, Henrich (2004) menjelaskan dengan adanya norma resiprositas dapat memberikan solusi bagi suatu permasalahan dengan sistem timbal balik yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain.

Dalam model timbal balik tersebut terdapat strategi saling memberi manfaat (*benefit*) diantara individu satu atas individu lainnya. Dimana manfaat yang telah berlalu akan tetap dirasakan dan akan memberikan manfaat yang sama bahkan lebih terhadap pemberi manfaat di masa lalu. Dalam strategi ini terdapat manfaat yang tertahan untuk dapat digunakan di masa yang akan datang. Lebih lanjut Henrich berpendapat bahwa hubungan kekerabatan dan adanya resiprositas secara langsung (*direct reciprocity*) telah berhasil di dalam memahami berbagai perilaku sosial.

Teori Modal Sosial (*Social Capital*) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Modal sosial (*social capital*) adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu modal manusia (*Human Capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial, lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Modal sosial juga sangat dekat dengan terminologi sosial lainnya seperti yang dikenal sebagai kebajikan sosial (*social virtue*). Perbedaan keduanya terletak pada dimensi

jaringan. Kebajikan sosial akan sangat kuat dan berpengaruh jika didalamnya melekat perasaan keterikatan untuk saling berhubungan yang bersifat timbal balik dalam suatu bentuk hubungan sosial.

Modal sosial (*social capital*) dibutuhkan untuk menciptakan komunitas moral yang tidak bisa diperoleh begitu saja melalui keputusan investasi rasional, yakni keputusan individu untuk "berinvestasi" dalam *human capital konvensional* seperti pendidikan universitas (Fukuyama, 1995). Putnam (2000) memberikan proposisi bahwa suatu entitas masyarakat yang memiliki kebajikan sosial yang tinggi, tetapi hidup secara sosial terisolasi akan dipandang sebagai masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah.

Modal sosial merujuk pada hubungan kepercayaan, kebersamaan dan pertukaran, aturan dan norma bersama, keterkaitan, dan jaringan di dalam masyarakat memungkinkan setiap anggota masyarakat melakukan aksi bersama dan mengamankan sumberdaya penting yang lain (seperti akses pasar, sumber keuangan, pengetahuan). Dengan demikian, modal sosial bermanfaat sebagai faktor penting untuk mempengaruhi dan menentukan bentuk keputusan dasar, termasuk juga pengaturan kelembagaan yang akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan dan kehidupan masyarakat pedesaan. Modal sosial merupakan elemen penting dalam pengelolaan lanskap dan penyediaan jasa ekosistem. Dalam banyak kasus, wilayah yang dikelola melewati batas lahan suatu kawasan atau lahan pertanian dengan beragam pemangku kepentingan. Oleh karena itu, para pelaku dalam lanskap tersebut perlu berkoordinasi demi terlaksananya praktek pengelolaan yang tepat.

Modal sosial juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun unit-unit pengelolaan lebih besar sehingga memung-

pengintegrasian pengelolaan lanskap heterogen dengan melibatkan semua pihak. Dalam konteks seperti, aksi bersama yang didefinisikan sebagai koordinasi kegiatan-kegiatan individual atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama menjadi sangat penting. Modal sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keefektifan skema kompensasi melalui dua cara. Pertama, mendorong munculnya kohesi internal dalam suatu masyarakat dengan memanfaatkan organisasi dan sumberdaya internal dalam mendiskusikan dan menyelesaikan konflik, membuat kesepakatan, dan menjalankan serta memonitor aksi. Kedua, modal sosial dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam bernegosiasi dengan pihak luar untuk memperoleh dukungan dan sumberdaya yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

Definisi *Social Capital* (Modal Sosial)

Coleman adalah orang pertama yang diyakini oleh banyak ilmuwan sebagai pencetus konsep modal sosial, mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurut Coleman (1998), modal sosial bukanlah entitas tunggal (*single entity*), tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen: (i) modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial; dan (ii) modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku (aktor) baik individu maupun perusahaan di dalam struktur tersebut (*within the structure*).

Menurut Fukuyama (1995) modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, demikian juga kelompok-kelompok masyarakat yang paling besar, negara, dan dalam seluruh

kelompok lain yang ada diantaranya.

Parthasarathy dan Chopde (1999) menulis tentang pentingnya *collective action* dalam mencapai kesuksesan pengambilan keputusan untuk meningkatkan teknologi agrikultur, dimana kooperasi menjadi prasyarat utama terwujudnya tujuan tersebut dengan penggunaan modal sosial sangat mendukung perolehan informasi yang mendukung kepada keputusan masyarakat untuk meningkatkan teknologi agrikultur. Dalam hal ini, kedua peneliti dari India tersebut menggambarkan modal sosial sebagai kemampuan mengembangkan dan menggunakan berbagai jaringan sosial dan sumber daya yang tersedia untuk dapat mengembangkan dan mendukung pada peningkatan teknologi agrikultur.

Hasil Studi Coleman (1994) tentang pemuda dan pendidikan (*youth and schooling*) mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya. Formulasi lain tentang konsep modal sosial dikemukakan juga oleh Adler dan Kwon (2000; dalam Hasbullah, 2006), yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dan dinamika modal sosial yang terdapat dalam struktur dimaksud.

Bourdieu (1986) yang pemikirannya

banyak dipengaruhi oleh *Marxist sociology*, mengemukakan konsep yang sedikit berbeda, terminologi modal menurutnya, memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu modal ekonomi, modal kultural dan modal sosial, di mana dalam modal sosial terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial dan diantaranya terinstitusionalisasikan dalam bentuk kehormatan dan kebangsawanan. Putnam lebih mengembangkan pemikirannya pada ide asosiasi dan aktifitas masyarakat sipil sebagai basis bagi terciptanya integrasi sosial dan kesejahteraan. Krisna (dalam Yustika, 2006) mengutip pendapat Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai "gambaran sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan".

Berawal dari definisi yang diangkat oleh para pelopor konsep modal sosial, akhirnya kini telah banyak berkembang berkaitan dengan definisi modal sosial yang coba diinterpretasikan sendiri oleh banyak pemikir lainnya. Pendapat Baker misalnya yang dikutip oleh Portes (1998) yang mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya yang diraih oleh pelakunya melalui struktur sosial spesifik dan kemudian digunakan untuk memburu kepentingannya; modal sosial tersebut diciptakan lewat perubahan-perubahan dalam hubungan antar pelakunya. Selanjutnya Portes juga mengutip pendapat dari Schiff yang mengartikan modal sosial sebagai "seperangkat elemen dari struktur sosial yang mempengaruhi relasi antar manusia dan sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi produksi dan atau manfaat (*utility*). Pendapat senada dikemukakan oleh Upoff yang pendapatnya ditulis kembali oleh Dhesi (2000; dalam Yustika, 2006), menyatakan bahwa modal sosial dapat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan *asset* yang

tidak terlihat (*intangible*) yang mempengaruhi perilaku kerjasama.

Pendapat lain dikemukakan Cohen dan Prusack (2001) yang mengartikan modal sosial sebagai stok dari hubungan yang aktif antar masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan (*trust*) kesaling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*share value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan Cox (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Bullen dan Onix (1998) mempunyai pandangan senada dengan menambahkan bobot terhadap dimensi modal sosial adalah kemampuannya sebagai basis sosial untuk membangun masyarakat sipil yang sebenarnya. Tanpa basis sosial yang kuat seperti yang terkandung dalam modal sosial, sebetulnya kehidupan itu sendiri bukanlah kehidupan yang berdimensi kemanusiaan.

Bank Dunia (1999; dalam Hasbullah, 2006) mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukan sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan *spektrum* yang lebih luas, yaitu sebagai perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok dari modal sosial

adalah: adanya partisipasi dalam suatu jaringan, resiprositas, kepercayaan, adanya norma, nilai-nilai serta adanya tindakan proaktif dalam suatu jaringan.

Pentingnya Pondasi Kelembagaan Ekonomi sebagai Pembuat Kebijakan

Aktor sosial memiliki preferensi (dalam nilai dan kegunaan) tetapi pilihan rasional tidak selalu berkenaan dengan pilihan atas nilai dan sumber. Yang menjadi penekanan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang konsisten dengan jenjang pilihan aktor. Dalam merealisasikan tujuannya maka akan dipertimbangkan 2 (dua) hal yang menjadi hambatan atas suatu tindakan, yaitu kelangkaan sumber dan kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial yang ada berpengaruh terhadap tindakan individu sejak lahir dalam berbagai hal, karena kelembagaan memiliki aturan, sanksi baik positif dan negatif yang memiliki daya dorong kepada aktor untuk merealisasikan tujuan. Yang mendasar suatu pilihan yang rasional, salah satunya adalah mekanisme agregasi atau proses dimana sebagian tindakan individu dikombinasikan untuk menghasilkan tindakan bersama (*collective action*) (Salim, 2002).

Dalam banyak literatur tentang teori ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics*), pentingnya peran negara diakui akan tetapi dalam konteks yang sempit, yakni mengenai cara menggunakan monopoli kekerasan dalam penegakan kontrak (*enforcement of contract*) dan hak kepemilikan (*property rights*). Pada momentum inilah sebuah pemerintah yang kredibel sangat diperlukan atau dalam tradisi ekonomi politik sering disebut sebagai "pemerintah yang kuat tetapi terbatas" (*strong but limited government*) [Bardhan, 1996]. Karena keterbatasan tersebut, maka diperlukan adanya kelem-

bagaan sosial untuk membantu kinerja pemerintah.

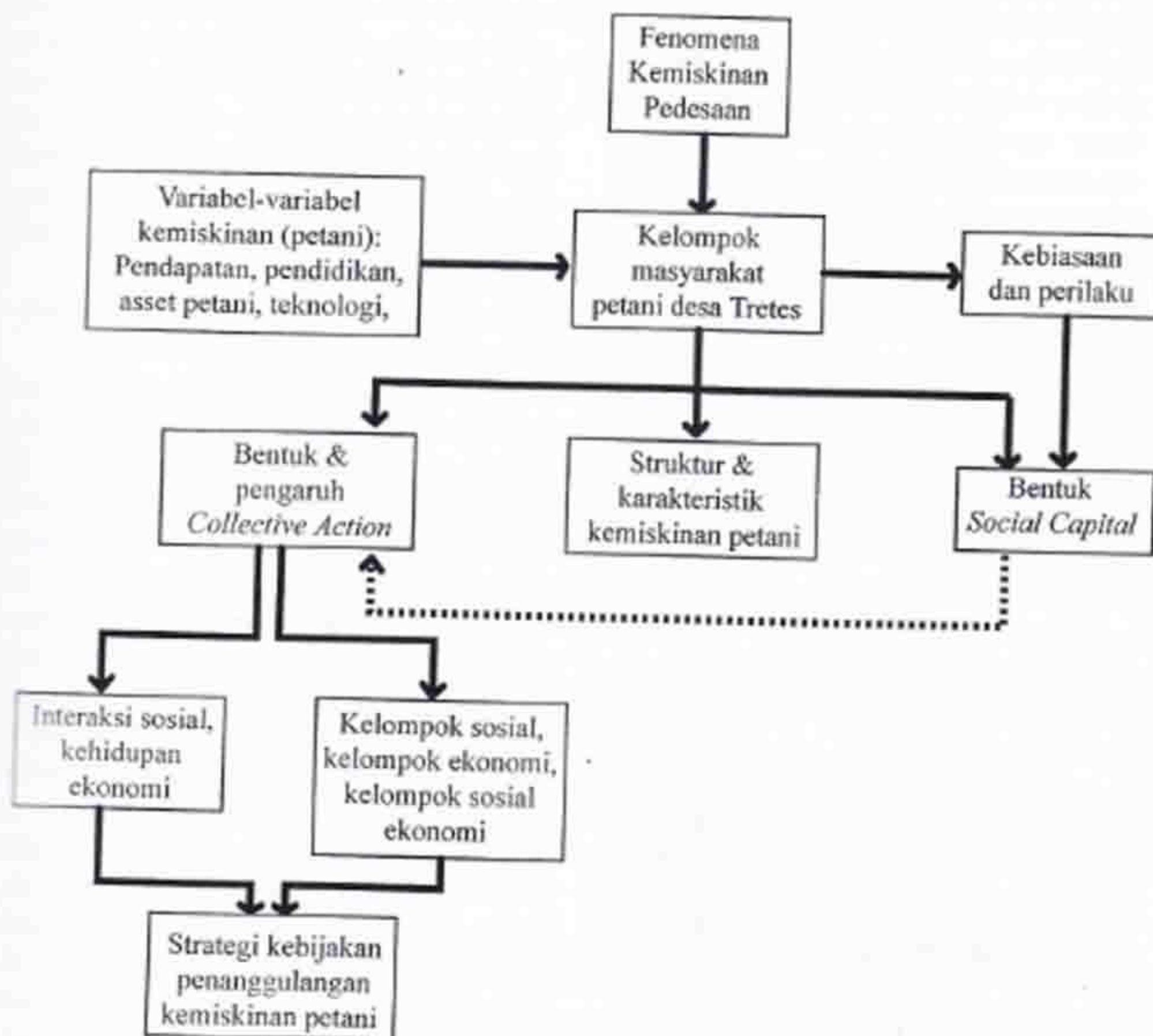
Peranan pemerintah biasanya lebih besar dibanding dengan komponen masyarakat yang lain. Kegiatan pembangunan sebagian besar adalah usaha pemerintah, bahkan seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggungjawab pemerintah. Kartasasmita (1997) menyebutkan bahwa banyak studi empiris yang menunjukkan kegagalan pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya peran masyarakat bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: (i) pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat bahkan pada sisi lain dirasakan merugikan, (ii) pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut, (iii) pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman, dan (iv) pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kiranya sangat diperlukan pula suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) serta adanya kebersamaan masyarakat. Bersamaan dengan pemikiran baru tentang tata kelola pemerintahan, lembaga donor juga menyusun pemikiran baru tentang kemiskinan dan hubungan antara kedua konsep tersebut. Mereka menyadari bahwa kemiskinan merupakan suatu konsep multidimensi dan tidak terbatas pada konsep ekonomi saja. Selain kekurangan pendapatan, kaum miskin juga menderita dari kekurangan/ketidakadaan pelayanan publik (telepon, listrik, air, transportasi umum, sarana kesehatan,

pendidikan, kredit, dll) dan kekurangan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik di tingkat lokal, regional, dan nasional. Karena itu kaum miskin sering merasa terpinggirkan dan tidak berdaya pada saat hak-hak mereka dilanggar dan dieksploitasi oleh kaum kaya dan berkuasa (Eid,

2000). Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan apabila seluruh aspek kemiskinan ingin dituntaskan, tidak hanya melalui kenaikan pendapatan saja, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan kaum miskin dan peningkatan peluang ekonomi, politik, dan sosial mereka (Blaxall, 2000; Eid, 2000).

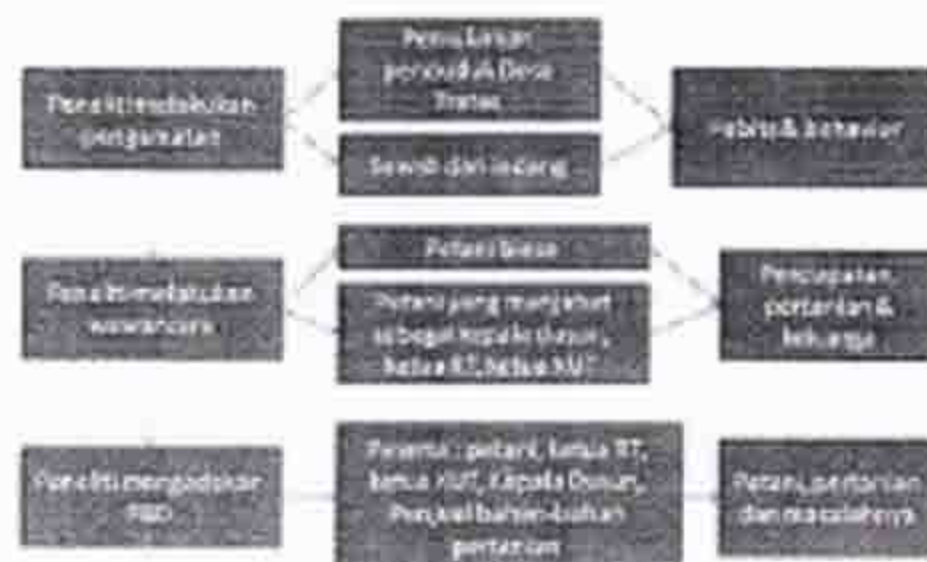
Gambar 2.1 Diagram Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan: Pendekatan Tindakan Kolektif (*Collective Action*) Pada Petani di Desa Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten Malang



METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai alat analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 2 (dua) macam data. *Pertama, data primer* yang diperoleh melalui penelitian empiris pada beberapa rumah tangga miskin (rumah tangga petani) dan institusi atau Pemerintah Daerah setempat yang diberi tanggung jawab untuk menangani permasalahan rumah tangga miskin (rumah tangga petani). Data ini diperoleh dengan beberapa cara, seperti penggunaan wawancara mendalam (*in-depth interview, melalui key persons*) dan investigasi serta melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pamong Desa dan warga Desa Tretes. Data primer juga dapat diperoleh lewat metode observasi kegiatan sehari-hari masyarakat petani. Kedua, data sekunder (studi dokumen) yang berasal dari departemen pemerintah (khususnya berkenaan dengan kebijakan pemerintah), lembaga riset, data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan lain-lain. Dalam hal ini data skunder diperoleh dari kantor Desa dan Kecamatan Pujon. Dari kedua sumber data tersebut diperoleh data yang lebih lengkap.

Gambar 1. Alur Pengumpulan Data



HASIL PENELITIAN

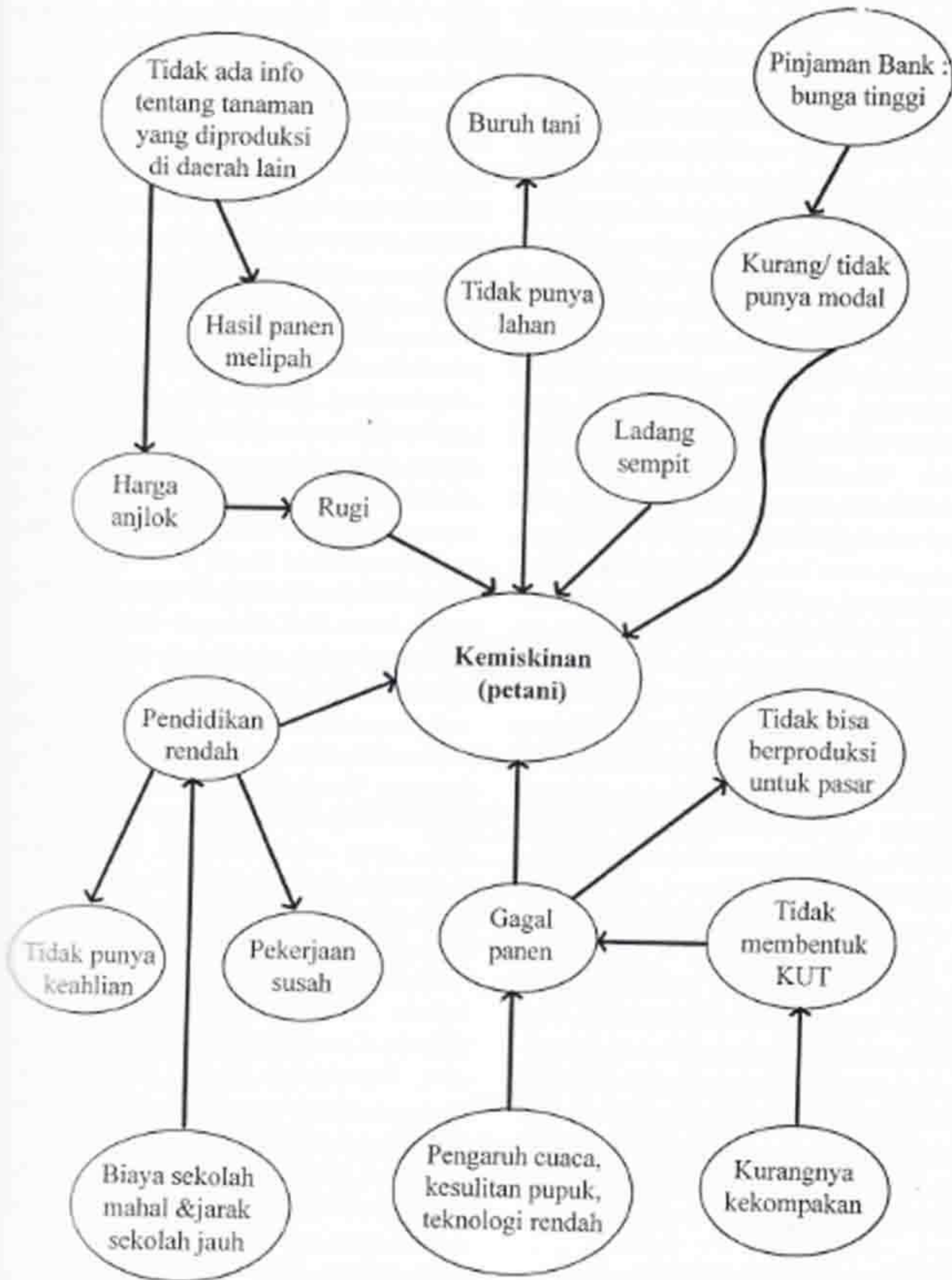
Struktur dan Karakteristik Kemiskinan Petani Desa Tretes

Peneliti melakukan pengamatan tentang penyebab kemiskinan di Desa Tretes dengan menganalisa akar penyebab kemiskinan serta perluasan pengaruhnya terhadap berbagai dimensi. Akar penyebab kemiskinan di Desa Tretes antara lain: (1) tidak adanya informasi tentang tanaman yang diproduksi di daerah lain; (2) sempitnya lahan pertanian; (3) rendahnya tingkat pendidikan; (4) rendahnya teknologi pertanian yang digunakan; serta (5) kurang/sedikitnya modal yang dimiliki oleh para petani. Masing-masing akar penyebab kemiskinan mempunyai turunan yang berbeda-beda dan semuanya akan bermuara pada kemiskinan petani di Desa Tretes. Gambar 2. menggambarkan secara detail sebab-akibat kemiskinan di Desa Tretes.

1. Sempitnya Lahan dan Tidak Mempunyai Lahan

Kepemilikan lahan petani Desa Tretes rata-rata kurang dari 1 ha dan hanya sebagian kecil saja yang memiliki lahan 1-1,75 ha bahkan ada beberapa petani yang tidak mempunyai lahan sendiri dan memutuskan untuk menyewa atau memanfaatkan lahan dari Perhutani dengan sistem penanaman tumpang sari. Sempitnya lahan yang dimiliki oleh petani Desa Tretes menyebabkan produksi tanaman sayur yang mereka produksi untuk pasar hanya sedikit bahkan sering kali tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh tengkulak. Jika terjadi demikian, maka petani tersebut tidak bisa memborongkan tanamannya dan harus menjualnya sendiri ke pasar atau menunggu barang kali ada pembeli kecil yang menginginkan tanamannya.

Gambar 2. Diagram Sebab-akibat Kemiskinan (hasil pengamatan & diskusi di desa Tretes)



Apabila biaya akomodasi untuk panen dan transportasi dirasa memberatkan dan tidak seimbang dengan harga penjualan, maka petani akan mengambil tindakan untuk tidak menjual tanamannya dan akan memanfaatkannya untuk pakan ternak mereka. Nasib yang lebih buruk menimpa petani yang tidak memiliki lahan pribadi. Mereka yang tidak mempunyai lahan biasanya menjadi buruh tani atau adapula yang menggarap lahan milik Perhutani. Para Petani memiliki kesepakatan dengan Perhutani untuk menanam pohon yang ditentukan oleh Perhutani dan sebagai imbalannya Perhutani memberi 20 (dua puluh) kayu dari 100 (seratus) kayu yang dipanen dan memperbolehkan para petani untuk memanfaatkan yang ditanami pohon tersebut dengan sistem tumpang sari. Sehingga bagi petani yang hanya mengandalkan lahan tersebut tidak akan memperoleh hasil yang banyak, karena tugas mereka tidak dapat memanfaatkan lahan yang ada dengan maksimal. Adapun petani yang juga tidak mempunyai lahan sendiri atau lahan sewa-an dan juga lahan pinjaman dari Perhutani, maka akan menjadi buruh tani, yang penghasilannya rata-rata Rp 7.000,- sampai Rp 10.000,- setiap setengah hari bekerja (antara jam 08.00-12.00).

2. Kurangnya Informasi

Lemahnya jaringan informasi yang dimiliki petani terhadap tanaman apa yang sedang diproduksi di daerah lain, menyebabkan kerugian pada petani. Hal tersebut dikarenakan barang pertanian akan melimpah jika sayur yang mereka tanam sama. Sehingga harga barang pertanian akan turun.

3. Sedikitnya Modal yang Dimiliki Petani

Keterbatasan modal yang dimiliki pe-

tani berdampak pada kemiskinan yang diderita petani. Modal sangat diperlukan ketika seseorang bergerak di bidang pertanian. Mereka memerlukan modal untuk berbagai kebutuhan proses bertani, mulai dari biaya tenaga kerja, kebutuhan pupuk dan pestisida (ladang 0,25 ha membutuhkan biaya 1 juta untuk sekali tanam), kebutuhan benih, biaya transportasi, dan lain-lain. Sehingga pada masa awal tanam sampai dengan masa panen, petani membutuhkan modal yang cukup besar tetapi mereka tidak bisa memprediksi hasil yang akan mereka peroleh. Oleh karena itu, petani akan memutuskan untuk meminjam uang ke Bank jika mereka mampu atau berhutang kepada ketua kelompok tani atau kepada orang yang dapat mereka pinjami. Sistem kredit Bank memang dirasa sangat memberatkan petani, karena bunga yang cukup tinggi, yakni mencapai 2% lebih. Sedangkan sistem pinjaman kepada ketua KUT dibangun dengan dasar kepercayaan dan asset yang dimiliki petani peminjam.

Pertama, jika petani meminjam kepada Bank maka risiko yang ditanggung adalah tingginya bunga Bank. Sehingga ketika mereka mengalami gagal panen/kerugian maka utang mereka kepada Bank akan menumpuk. Demikian halnya dengan peminjaman kepada koperasi, bedanya hanya pada segi besaran bunga.

Kedua, jika para petani meminjam kepada Ketua KUT sistemnya akan berbeda. Ketua KUT lebih mengandalkan pada kepercayaan (*trust*), tetapi tetap memperhatikan prediksi keberhasilan petani peminjam. Sehingga, dalam sistem kedua ini lebih lunak dan lebih nampak modal sosialnya. Tetapi, jika petani mengalami gagal panen/kerugian, maka yang lebih terkena dampaknya adalah petani peminjam. Dengan demikian kemiskinan akan kembali menimpa petani kecil.

4. Pola Kerjasama Yang Kurang Maksimal

Semangat gotong royong memang sangat melekat dan menjadi budaya masyarakat Desa Tretes. Akan tetapi semangat gotong royong hanya mencakup skop yang sempit dan sangat dibatasi oleh wilayah dimana mereka tinggal. Kerjasama dalam arti luas, yakni dalam lingkup petani, baik antardesa atau antarwilayah dirasa sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari kebersamaan waktu penanaman padi. Keberadaan KUT memang dirasa sangat menunjang, akan tetapi institusi petani tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat petani akan profesionalitas organisasi masih sangat kurang, pola komunikasi yang masih tradisional dan pendidikan yang rendah.

5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

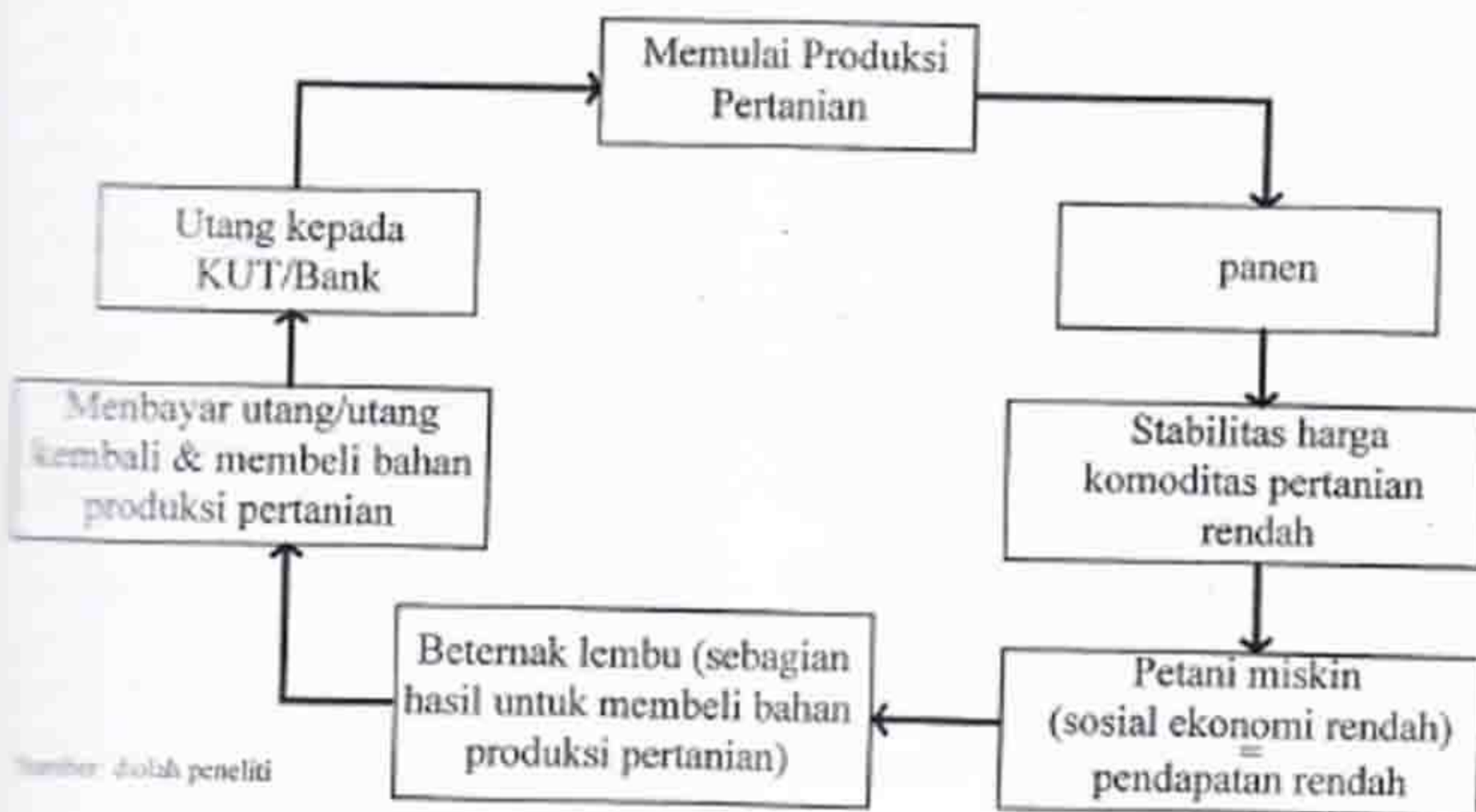
Penduduk Desa Tretes antara berpendidikan SDTT (Sekolah Dasar Tidak Tamat) sampai SLTP, dan rata-rata mengenyam pendidikan SD. Rendahnya tingkat pendidikan

dikan mereka disebabkan oleh pandangan masyarakat desa setempat yang tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Tidak ada seorang petani pun yang berpendapat bahwa menjadi seorang petani juga memerlukan pendidikan yang tinggi, pengetahuan dan wawasan yang cukup, serta penguasaan teknologi untuk mendukung pertanian.

Fenomena mata pencaharian sebagai petani sepertinya telah menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Desa Tretes. Rendahnya pengetahuan dan informasi menjadikan petani Desa Tretes kurang berkualitas dalam berfikir, memutuskan suatu masalah dan melakukan inovasi di bidang pertanian. Sedangkan, jika mereka ingin berpindah pada profesi lain akan terhambat dengan adanya pendidikan yang rendah. Hal ini pernah diungkapkan oleh peserta FGD:

"Kita ini mau ndak mau ya harus berusaha untuk bagaimana usaha tani itu bisa maju dan berhasil. La wong mau pindah jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) ya ndak mungkin. Wong kita ini rata-rata lulusan SD (Sekolah Dasar)."

Gambar 3. Skema Perangkap Kemiskinan (*poverty trap*) Petani Desa Tretes



Sumber: data peneliti

Perangkap kemiskinan petani Desa Tretes seperti yang nampak pada Gambar 3. mencerminkan adanya lingkaran setan yang sulit ditembus oleh petani dalam rangka keluar dari kemiskinan yang membelenggu mereka. Disaat memulai proses produksi pertanian mereka harus mengambil keputusan untuk utang karena tingginya biaya produksi pertanian. Dengan kepemilikan lahan seluas 0,5 ha untuk menanam komoditas bawang merah membutuhkan biaya produksi 7 juta rupiah. Jika saat panen tiba harga bawang merah stabil, maka petani masih bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Jika saat panen harga bawang merah melonjak tinggi, maka petani akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Tetapi jika harga bawang merah merosot, maka petani akan mengalami kerugian. Implikasi dari kerugian yang menimpa petani adalah bertambahnya jumlah hutang. Usaha untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan dicoba dengan beternak lembu yang memberikan kepastian pendapatan petani, namun hasil penjualan susu lembu juga dimanfaatkan untuk menutup hutang dan membeli kembali bahan-bahan untuk proses produksi pertanian. Begitulah seterusnya, hingga petani tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya sehingga daya beli masyarakat petani tergolong rendah.

MODAL SOSIAL

Menurut Tonnie (1887; dalam Purnomo, 2004) adapun watak dari petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan itu, menurut para ahli dari abad ke-19 yang lalu, dijiwai oleh maksud serba rela, atau *wesenwille* dalam pergaulan. Hal tersebut memang terbukti dari cara bergaul dan bermasyarakat penduduk Desa Tretes. Semangat gotong royong yang masih eksis dan resiprositas yang cukup tinggi dan kepercayaan (*trust*) masih

dijadikan acuan untuk berinteraksi satu sama lain. Seperti yang telah diungkapkan oleh Hasbullah (2006) di Bab II, bahwa ada 6 (enam) unsur yang terdapat dalam modal sosial yaitu: partisipasi dalam suatu jaringan, resiprositas (*reciprocity*), kepercayaan (*trust*), norma sosial, nilai-nilai serta tindakan proaktif.

Diantara 6 (unsur) modal sosial tersebut, unsur yang sangat menonjol adalah kepercayaan (*trust*) berikut menyusul resiprositas (*reciprocity*).

1. Bentuk Resiprositas (*Reciprocity*)

Bentuk resiprositas merupakan bentuk hubungan timbal balik yang dilakukan antara 2 (dua) orang atau lebih. Hubungan tersebut bersifat mutualisme (saling menguntungkan) satu sama lain. Resiprositas ini merupakan salah satu modal sosial yang dapat mendorong solidnya suatu jaringan sosial. Jika unsur modal sosial ini berlangsung dengan baik di kalangan petani dan terjadi secara terus menerus, maka dapat menjadi suatu budaya positif yang melekat di masyarakat. Budaya yang positif tersebut akan menciptakan iklim yang sama pada petani Desa Tretes dan dapat menjadi faktor pendukung tindakan kolektif yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah bersama.

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruisme (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain).

Saling tukar kebaikan di Desa Tretes dapat terjadi pada aktivitas apa saja. Seperti yang telah dicontohkan di atas, yaitu pada peristiwa hajatan. Ketika hajatan

tan (pernikahan dan khitanan) digelar, maka sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk menyumbangkan uang. Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian diberi nama pemberinya. Setelah hajatan selesai dan semua tamu meninggalkan lokasi hajatan, tuan rumah yang menggelar hajatan mulai membuka "kotak uang" dan membuka amplop satu per satu. Sambil membuka amplop, ada yang bertugas mencatat besaran uang yang ada di dalamnya dan mencatat nama yang tertera pada amplop tersebut. Hal demikian dilakukan masyarakat setempat untuk mempermudah "pengembalian" jika suatu waktu orang yang member sumbangan tersebut mengadakan hajatan atau mengalami suatu hal yang membutuhkan bantuannya. Bentuk resiprositas yang lain terlihat pada aktivitas masyarakat seperti : membangun rumah warga, membangun jalan, jembatan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal ini, Tohir (Ketua Kelompok Tani) berkomentar tentang gotong-royong masyarakat Desa Tretes, dia menuturkan:

"Menawi gotong royong nopo mawon ten mriki niki tiyange cepet mbak. Niki dateng ngajeng nggriyo kulo niki lagi mbangun kandange tanggi, ngoteniku mboten sisah dikengken langsung moro kiyambek. Nopo mawon pun, tiyang nggadahi damel, mbangun omah, pokoke cepet dateng, mriki niki. Senonso wonten ingkang iri tanggine nggadahi tamu tiyang sugih, tapi ngoteniku namung digunem mawon, tapi gotong royonge tetep."

"Kalau gotong royong apa saja di sini orangnya cepat mbak. Ini di depan rumah saya sedang membuat kandang (untuk lembu), gitu itu tidak usah disuruh langsung datang sendiri (untuk membantu). Ada apa saja, orang hajatan, membangun rumah, pokoknya cepat datang (untuk membantu) di sini ini. Walaupun ada yang

iri tetangganya mempunyai tamu orang kaya, tapi hal tersebut hanya dibuat bahan pembicaraan saja, tapi gotong royongnya tetap."

Dalam hal ini modal sosial berperan untuk menyediakan keuntungan-keuntungan yang menjadi prasyarat bagi kerja sama dan resiprositas. Seperti yang ditunjukkan oleh Lin, bahwa ada sejumlah mekanisme sentral yang membawa hasil keuntungan-keuntungan tersebut, termasuk: informasi, pengaruh perantara-perantara, konfirmasi keadaan yang dapat dipercaya, dan penguatan dari janji-janji dan komitmen-komitmen (Lin, 2001). Sehingga dapat dibuktikan bahwa modal sosial sungguh menghasilkan keuntungan-keuntungan positif yang jelas untuk anggota-anggota jaringan dan komunitas secara luas.

2. Bentuk Kepercayaan (Trust)

Jika resiprositas tidak dijalankan dengan baik maka akan sangat mempengaruhi kepercayaan (*trust*). Pandangan modal sosial menyatakan bahwa kerjasama tergantung pada kepercayaan. Pentingnya kepercayaan dapat dilihat dari berbagai macam situasi. Sistem kepercayaan di Desa Tretes terlihat dari percakapan penulis dengan Tohir sebagai berikut:

"Saya ini selain macul di sawah sama angon lembu juga jual pupuk, benih, pestisida. Sistemnya kerjasama sama pabrik mbak. Jadi saya ini salesnya pabrik. Jadi gini, petani yang ikut Kelompok Tani saya, ngambil benih dulu, kasarannya ngutang gitulah, pupuk juga gitu ngambil dulu. Terus nanti kalau sudah panen baru mereka bayar semuanya."

Kemudian penulis bertanya tentang sistem jaminan yang diberikan, Tohir menjawab:

"Caranya itu ya saya yang harus lihat seberapa besar lahannya terus kira-kira disesuaikan dengan cuaca prediksi keber-

hasilannya gimana. Nah, dari situ nanti saya bisa nentukan (menentukan), saya bisa minjemi (meminjami) berapa banyak. Jadi walaupun saya rugi ya ndak rugi nemen-nemen (tidak terlalu rugi). Kalau ada orang yang mau pinjam uang juga gitu mbak, saya lihat dulu semuanya, tapi tidak saya samakan kayak bisnis, kalau minjamkan (meminjamkan) uang itu kan harus ikhlas, saya itu uang kembali apa ndak sudah saya iklaskan dulu. Wong cari saudara itu susah mbak, lha tapi kalau cari musuh gampang”.

Terlihat dari ungkapan yang disampaikan oleh Tohir bahwa terdapat sistem kepercayaan (*trust*) yang disadari atau tidak oleh 2 (dua) orang atau lebih yang akan melakukan suatu transaksi. Kepercayaan (*trust*) dan keadaan dapat dipercaya diibaratkan seperti minyak pelumas yang meminyaki roda-roda berbagai transaksi ekonomi dan sosial yang tanpanya mungkin akan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan memakan banyak waktu (field, 2005). Hal ini sangat relevan dengan konsep modal sosial yang menekankan suatu cara di mana jaringan-jaringan memberikan akses pada berbagai sumber daya. Francois (2003) juga memandang kepercayaan (*trust*) sebagai komponen ekonomi yang relevan dan melekat pada kultur yang ada pada masyarakat yang akan membentuk kekayaan modal sosial.

Petani Desa Tretes memposisikan kepercayaan (*trust*) sebagai komponen dasar modal sosial mereka di dalam jaringan petani. Bentuk kepercayaan (*trust*) pada petani Desa Tretes dapat dilihat dari: (1) sistem peminjaman modal, (2) pemberian bantuan, serta (3) pelimpahan amanah.

Tabel 2. Bentuk Modal Sosial Desa Tretes

No	Unsur Modal Sosial	Bentuk Modal Sosial
1	Partisipasi Dalam Suatu Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Menjadi anggota KUT ▶ Mengikuti kegiatan rutin
2	Resiprositas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Saling membantu diberbagai bidang ▶ Peristiwa hajatan
3	Kepercayaan (<i>Trust</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sistem peminjaman modal ▶ Pemberian bantuan ▶ Pelimpahan amanah
4	Norma Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kejujuran ▶ Kepedulian
5	Nilai-Nilroai	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tata krama: “nurut” ▶ Saling menghargai
6	Tindakan Paktif	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mampu mengungkapkan pendapat ▶ Terlibat dalam berbagai penyuluhan pertanian ▶ Proaktif dalam menyelesaikan masalah ▶ Proaktif dalam kegiatan sosial

Sumber: Diolah peneliti

TINDAKAN KOLEKTIF (COLLECTIVE ACTION)

Tindakan kolektif pada petani Desa Tretes muncul dari kesepakatan (*arrangement*) dari petani Desa Tretes yang memiliki homogenitas ketidakstabilan pendapatan dari hasil pertanian, yang menyebabkan kondisi miskin. Bentuk kesepakatan petani Desa Tretes antara lain: (1) keputusan untuk beternak lembu, (2) keinginan untuk mendapatkan informasi tentang tanaman yang diproduksi di daerah lain, (3) keputusan untuk memulai menanam padi, serta (4) keputusan untuk memilih menjadi anggota KUT. Secara ringkas pengaruh dari masing-masing tindakan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Bentuk dan Pengaruh Tindakan Kolektif

Bentuk	Pengaruh
Keputusan beternak lembu	- Meminimalisir gab antara pengeluaran dan pendapatan - Meningkatkan kesejahteraan
Keputusan menanam jenis sayuran	- Stabilisasi harga komoditas pertanian
Keputusan memulai menanam padi	- Meminimalisir kegagalan panen
Keputusan memilih menjadi anggota KUT	- Mempermudah pemecahan masalah pertanian

Sumber: diolah peneliti

KESIMPULAN

Dari adanya berbagai macam penyebab kemiskinan petani Desa Tretes serta pengaruh tindakan kolektif (*collective action*) terhadap penanggulangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengamatan peneliti di Desa Tretes, menyimpulkan bahwa akar penyebab kemiskinan di Desa Tretes antara lain adalah: (1) informasi tentang tanaman yang diproduksi di daerah lain; (2) sempitnya lahan pertanian; (3) rendahnya tingkat pendidikan; (4) rendahnya teknologi pertanian yang digunakan; serta (5) kurang/sedikitnya modal yang dimiliki oleh para petani.

2. Modal sosial dalam jaringan petani Desa Tretes dapat dibangun dengan adanya: partisipasi dalam suatu jaringan, kepercayaan (*trust*), resiprositas (*reciprocity*), norma sosial, nilai-nilai serta tindakan proaktif. Unsur-unsur modal sosial tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat petani di Desa Tretes. Kekurangan yang dapat menjadi kelemahan petani adalah tidak adanya jaringan antar petani dengan wilayah yang berbeda yang menyebabkan tidak terbangunnya

modal sosial di dalamnya. Hal tersebut mengindikasikan lemahnya kelembagaan di bidang pertanian. Disisi lain komponen modal sosial yang paling menonjol dan menjadi faktor pendukung utama adalah aspek kepercayaan (*trust*) dan resiprositas (*reciprocity*).

3. Bentuk dan pengaruh tindakan kolektif (*collective action*) dalam lingkaran kemiskinan di Desa Tretes dapat diketahui dari pola interaksi masyarakat dan cara masyarakat menentukan suatu keputusan. *Pertama*, keputusan petani untuk beternak lembu disebabkan oleh kesamaan cara berfikir bahwa keputusan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tindakan kolektif petani untuk beternak lembu dan menjual susunya melalui penjual sama membawa pengaruh pada tingkat kesejahteraan dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan petani. *Kedua*, keputusan petani untuk menanam jenis sayuran. Dalam kasus ini ada kesamaan opini petani Desa Tretes menginginkan adanya informasi dari petani desa lain perihal tanaman yang sedang diproduksi sehingga mereka dapat menentukan jenis tanaman apa yang akan mereka produksi dengan harapan kuantitas suatu komoditas tidak melebihi permintaan pasar yang akan berpengaruh pada stabilitas harga. *Ketiga*, kesamaan waktu dalam menanam padi. Kesamaan waktu dalam penanaman padi dimaksudkan petani Desa Tretes untuk meminimalisir kegagalan panen. Jika penanaman tidak dilakukan bersama-sama, maka tanaman padi akan mudah diserang hama dan kemungkinan gagal panen sangat besar. *Keempat*, keputusan petani untuk mendirikan KUT. Keputusan untuk mendirikan KUT merupakan kebijakan sosial yang mengarah pada proses penurunan kemiskinan petani. KUT mempunyai kekuatan untuk mengkoordinasikan petani dalam

menghadapi berbagai permasalahan bersama. Seperti masalah kelangkaan pupuk, mengatasi masalah hama dan penyakit yang menyerang tanaman, bisa mendatangkan PPL, bisa didatangi Dinas Pertanian dan memperoleh sedikit bantuan, dan lain-lain.

4. Tindakan kolektif (*collective action*) yang dilakukan oleh petani Desa Tretes mempunyai dampak terhadap kehidupan petani Desa Tretes dalam usaha mereka untuk meningkatkan kesejahteraan.

Namun demikian, kesejahteraan yang diharapkan untuk benar-benar keluar dari perangkap kemiskinan masih belum dapat dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya campur tangan pemerintah secara tidak langsung untuk mendukung tindakan kolektif yang telah dilakukan oleh petani dengan bertindak sebagai pengarah dan melembagakan pertanian dengan lebih terstruktur.

SARAN DAN KEBIJAKAN

1. Sesuai dengan struktur dan karakteristik kemiskinan di Desa Tretes, di mana akan penyebab kemiskinan Desa Tretes meliputi: (1) tidak adanya informasi tentang tanaman yang diproduksi di daerah lain; (2) sempitnya lahan pertanian; (3) rendahnya tingkat pendidikan; (4) rendahnya teknologi pertanian yang digunakan; serta (5) kurang/sedikitnya modal yang dimiliki oleh para petani. Sehingga untuk keluar dari belenggu kemiskinan tersebut, berbagai macam tindakan kolektif dilakukan petani Desa Tretes. Tindakan kolektif yang dilakukan petani Desa Tretes antara lain: (1) tindakan beternak lembu; (2) tindakan menanam jenis sayuran; (3) keputusan memulai menanam padi; serta (4) keputusan memilih menjadi anggota KUT. Tetapi kendala yang mereka hadapi adalah adanya perangkap kemiskinan yang sulit untuk ditembus.

2. Campur tangan pemerintah secara tidak

langsung diperlukan untuk mendukung tindakan kolektif (*collective action*) yang dilakukan petani Desa Tretes. Hal tersebut dimaksudkan agar tindakan kolektif yang telah eksis dapat dijalankan untuk mencapai tujuan utama, yaitu keluar dari perangkap kemiskinan menuju kesejahteraan petani.

3. Campur tangan pemerintah secara tidak langsung harus didasarkan pada tindakan kolektif sebagai bentuk inisiasi dari petani Desa Tretes.

Tindakan kolektif pada pemeliharaan lembu. Hasil wawancara menunjukkan tindakan kolektif ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani, karena jika petani hanya bergantung pendapatan pada hasil komoditas pertanian maka pendapatannya cenderung tidak stabil. Pemeliharaan lembu terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani dan hasilnya memberikan kepastian pendapatan. Permasalahannya adalah pengelolaan keuangan pada masing-masing rumah tangga petani. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa petani cenderung memanfaatkan pendapatan dari hasil perahan susu lembu untuk membiayai ongkos produksi pertanian, sehingga pendapatan tersebut seperti "tidak berbekas". Oleh karena itu petani tetap memasuki perangkap kemiskinan. Dalam hal ini, saran yang diajukan peneliti adalah perlunya perhatian pemerintah terhadap kepemilikan lembu. Hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan kredit atau penyewaan lembu kepada petani melalui KUT dan yang bertindak sebagai pengawas adalah dinas pertanian. Dengan demikian secara tidak langsung terbangun kontrak sosial antara petani dengan pemerintah.

4. Oleh karena KUT dilibatkan secara langsung, maka pemerintah juga harus memperkuat kelembagaan KUT. Artinya harus ada aturan formal dalam KUT terhadap sistem organisasi KUT.
5. Kelembagaan KUT yang kuat diharapkan dapat membangun jaringan sosial petani yang lebih luas, sehingga dapat mendorong timbulnya tindakan kolektif antar KUT. Berkaitan dengan stabilisasi harga, tindakan kolektif KUT dapat diarahkan pada spesialisasi tanaman di masing-masing daerah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan komoditas pertanian. Dengan demikian, stabilitas harga akan tercapai.
6. Berkaitan dengan teknologi pertanian di Desa Tretes yang masih bersifat tradisional dan pola pertanian yang masih sangat tergantung pada cuaca maka diperlukan kebijakan makro dari pemerintah seperti penerapan teknologi pertanian yang tidak menggantungkan pada cuaca. Penerapan kebijakan tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan pengambilan sampel daerah mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pengkajian lebih lanjut perihal teknologi pertanian disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penerapan teknologi pertanian yang relevan dilakukan di Indonesia.
7. Kebijakan bagi penanggulangan kemiskinan petani di pedesaan kiranya harus sesuai dengan kondisi wilayah dan melihat berbagai kondisi sosial masyarakat. Sehingga suatu kebijakan

bisa bersifat jangka panjang dan mampu menyelesaikan permasalahan serta tidak menimbulkan permasalahan sosial yang baru.

Tabel 4. Bentuk Kesepakatan Petani Desa Tretes dan Saran Penerapan Kebijakan

Sumber: diolah peneliti

No	Kesepakatan (<i>Arrangement</i>)	Kendala	Kebijakan Eksternal (<i>Policy</i>)
1	Beternak lembu	Pendapatan naik tetapi masuk perangkap kemiskinan karena digunakan kembali untuk membeli barang produksi pertanian	Bantuan kredit/penyewaan lembu oleh pemerintah melalui KUT dengan kontrol ketat dari Dinas Pertanian
2	Keinginan untuk memperoleh informasi jenis sayuran yang akan ditanam di daerah lain	Informasi tidak pernah didapatkan.	Memperkuat kelembagaan KUT (terdapat aturan formal) sehingga terbentuk jaringan sosial antara KUT yang lebih luas. Akhirnya petani dapat menyeimbangkan permintaan dan penawaran komoditas sayuran sehingga akan berdampak pada stabilitas harga.
3	Keinginan stabilisasi harga sayuran	Petani tidak dapat memprediksi kondisi harga sayur.	

DAFTAR PUSTAKA

- Bardhan, Pranab. 1996. *The Nature of Institutional Impediments to Economic Development*. Institute of Business and Economic. Centre for International and Development Economics Research. University of California. Berkeley. USA.
- Blaxall, John, 2000. "Governance and Poverty", Makalah dipresentasikan pada the Joint Workshop on Poverty Reduction Strategies in Mongolia, The World Bank, Ulan Bator, Mongolia, October 4 to 6.
- Bourdieu, P. 1986. *The Forms of Capital*. in J. G. Richardson (ed.) *Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education*. Greenwood Press. New York.
- Bullen, Paul dan Jenny Onyx. 1998. *Measuring Social Capital in Five Community in NSW*. Managemen Alternatives. Australia.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- Cohen, D. dan Prusack, L. 2001. *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work*. Harvard Bussiness Press.
- Coleman, James S. 1994. *Foundations of Social Theory*. The Belknap Press of Harvart University Press. Terjemahan. Penerbit Nusa Media. Bandung.
- Coleman, James S. 1998. *Social Capital in The Creation of Human Capital*. *The American Journal of Sociology*, 94 (supplement): S95-S120.
- Cox, Eva. 1995. *A Truly Civil Society*. ABC Books. Sydney.
- Dasgupta, P. 2000. *Economic Progress and Idea of Social Capital*. In P. Dasgupta and I. Serageldin (Ed). *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. The World Bank. Washington DC.
- Eid, Uschi. 2000. "Good Governance for Poverty Reduction", Makalah dipresentasikan pada the Asian Development Bank Seminar on The New Social Policy and Poverty Agenda for Asia and the Pasific, Chiang Mai, Thailand, May 5.
- Field, John. 2005. *Modal Sosial*. Bina Media Perintis. Medan
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford. Blackwell Publishers. USA.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust : The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. Free Press. New York.
- Fukuyama, Francis. 1999. *Social Capital and Civil Society*. Institue of Public Policy. George Mason. Univesity.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Social Capital and Development: The Coming Agenda*. SAIS Review XXII (1): 23-37.
- Gächter, Simon and Ernst Fehr. 1999. *Collective Action as A Social Exchange*. *Journal of Economic Behavior and Organization*. Vol.39 p.341-369. Elsevier Science B.V. All rights reserved.
- Gächter, Simon., Benedikt Herrmann, and Christian Thöni. 2004. *Trust, Voluntary Cooperation, And Socio-Economic Background: Survey And Experimental Evidence*. *Journal of Economic Behavior and Organization*. Vol.55.p.505-531 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. MR-United Press. Jakarta.
- Henrich, Joseph. 2004. *Cultural Group Selection, Coevolutionary Processes and Large-Scale Cooperation*. *Journal of Economic Behavior and Organization* vol:53. Elsevier.

- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya Di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Lewis, Oscar. 1966. *Kebudayaan Kemiskinan*. dalam Parsudi Suparlan. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Mas'oed, Mochtar. (1994). *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Miller, Byron. 1992. *Collective Action and Rational Choice: Place, Community and The Limits of Individual Self-Interest*. *Economic Geography* vol.68 no.1. Rational choice, collective action and technological learning. J-Stor.
- Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muttaqin, Hidayatullah. 2007. *Peran Negara dan Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan*. <http://www.e-syariah.net/artikel.asp>
- Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups*. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts. London. England.
- Ostrom, Elinor. 2000. *Collective Action and The Evolution of Social Norm*. *Journal of economic perspectives*. Vol 14 no.3. Page 137-158
- Portes, A. 1998. *Social capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. *Annual Review of Sociology*. 24. 1-24.
- Ritzer, George. 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Allyn and Bacon, Inc. Boston. Disadur oleh Ali-mandan. *Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. 1985. CV. Rajawali. Jakarta
- Sahdan, Gregorius. 2007. *Menanggulangi Kemiskinan Kota*. <http://www.kemeneg.pdt.go.id/artikel.asp?id>
- Sayogjo. 1976. *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Bharata Karya Aksara. Jakarta.
- Sukmana, Oman. 2005. *Sosiologi & Politik Ekonomi*. Penerbit UMM Press. Malang.
- Susanto, Astrid S. 1977. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Penerbit BinaCipta, Bandung.
- Wie, Thee Kian. 1989. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. cet.ke-3. LP3ES. Jakarta.
- World Bank. 1990. *World Development Report 1990: World Development Indicator*. Washington: Oxford University Press.
- Yustika, A. Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori & Strategi*. Bayu Media Publishing. Malang.